

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peristiwa masa lampau, meski hanya tercatat dalam nalar, sejatinya telah menjadi sejarah. Minimal bagi penganangnya atau yang berkepentingan mengenangnya. Sejarah bagaimana mestinya, sangat penting untuk dipahami dan diambilkan sari patinya sebagai sandaran melakukan perubahan. Sebab, disadari atau tidak, apa yang terjadi saat ini, bahkan yang membentuk kita masa kini tidak terlepas dari proses panjang pergulatan sejarah, baik yang masih utuh maupun yang telah terkoyak dimakan zaman.

Melihat ke belakang bukanlah mengharuskan kita untuk mundur, atau sebagai upaya mengulangi kembali romantisme kejayaan kalaupun ada pada masa lalu. Sekali lagi, upaya tersebut harus dilakukan sebagai langkah awal untuk menggali energi yang berbentuk spirit demi membangkitkan kembali gairah pembangunan di daerah ini. Membuka kembali lembaran masa lampau, menafsirkannya, mengkritiskannya, memahaminya, serta mengambil pelajaran darinya akan lebih mudah bagi kita dalam menempatkan titik tujuan, kemana kapal besar Bolaang Mongondowini akan melangkah ke masa depan.<sup>1</sup>

Pandangan Foucault, Sejarah selalu ditulis dari perspektif masa kini. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus menerus dievaluasi. Pandangan dapat berguna sebagai alat baca gerak perkembangan diakronik dan rantai terwujudnya corak khas perjalanan sejarah Bolaang

---

<sup>1</sup>Donald Qomaidiansyah Tungkagi, *Membaca Kembali Bolaang Mongondow Renungan Masa Lalu Kini dan Nanti* 2017 Jaten :oase Grup. hlm 4

Mongondow. Upaya memahami masa lampau yang membentuk masa sekarang serta kaitanya dengan masa mendatang ternyata dapat dipetakan demi memudahkan kita untuk memahaminya.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan sejarah negara ada yang memilih monarki atau kerajaan, tapi dengan wujud demokrasi. Raja sebagai Kepala Kerajaan dengan kekuasaan yang sudah dibatasi. Sementara kepala Pemerintahanya berbentuk perdana Menteri dan dipilih lewat pemilu oleh partai politik. Bentuk bentuk negara dan pemerintahan seperti ini antara lain terdapat di Inggris, Belanda, Jepang dan Muangthai. Akan tetapi di banyak tempat, pemerintahan yang berasas demokrasi telah tersebar luas

Selain itu, ada pula yang mewujudkan sistem presidentil dengan presiden sebagai kepala Negara. Juga ada yang sistem parlementer dengan perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan. Yang sampai kini masi bertahan sistem kerajaan dengan raja sebagai kepala pemerintahan hanyalah Saudi Arabia dan Jordania.<sup>3</sup> Dan agak unik adalah Malaysia. Para raja dipilih secara bergilir oleh negara-negara bagian. Sementara, Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri.

Indonesia sendiri pernah memiliki Presiden dan perdana Menteri (zaman Ir. Soekarno). Kemudian memiliki Presiden tanpa perdana Menteri. Bahkan di Zaman rezim Presiden Soeharto, kekuasaan Presiden begitu absolut. Setelah perubahan rezim berganti dari Orde baru ke orde reformasi, kekuasaan presiden lebih dapat lebih dapat dikontrol DPR.

Secara Etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang

---

<sup>2</sup> Donald Qomaidiansyah Tungkagi, *Membaca Kembali Bolaang Mongondow Renungan Masa Lalu Kini dan Nanti* 2017 Jaten :oase Grup. hlm 5

<sup>3</sup>Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*2012 Jakarta:Prenada Media. hal 110

berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>4</sup>

Rakyat secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri untuk memimpin suatu wilayah, adapun demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan memilih sebagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga Bupati, Gubernur dan Walikota. Warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warganegara yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan semua kekuasaan negara berasal dari rakyat. Semua lembaga negara menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kepentingan rakyat, yaitu keadilan, keamanan dan kesejahteraan untuk semua orang. Rakyat menentukan lembaga-lembaga negara, rakyat memilih para pejabat negara, dan selanjutnya rakyat mengawasi para pejabat negara agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak rakyat.

Demokrasi pun merupakan pemerintahan oleh semua dan untuk kepentingan semua orang. Demokrasi bukan sekedar pemerintahan oleh mayoritas, ras, dan suku tetapi semua orang bisa memerintah tanpa mengenal mayoritas, ras, suku.

Semua warganegara ikut memerintah, dengan hak dan kewajiban warganegara yang sama, dan dengan hak asasi manusia yang sama pula. Pejabat negara harus selalu sadar bahwa mereka harus melayani seluruh rakyat secara adil dan demokratis. Mandat yang diterima yang

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* 2012 Jakarta: Prenada Media. hal 110

diterima seorang pejabat negara adalah mandat dari seluruh rakyat bukan hanya dari kelompok atau pemilihnya saja, dan oleh karena itu juga harus melayani kepentingan seluruh rakyat.<sup>5</sup>

Demokrasi dapat berlangsung apabila rakyat dapat hidup bersama. Di atas segala perbedaan yang ada, seperti perbedaan ras, suku, agama, profesi hak milik, kepandaian, dan berbagai perbedaan lainnya disepakati ada satu cita-cita yang harus diperjuangkan sama-sama.<sup>6</sup>

Hak dan Kewajiban Adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Adapun hukum subjektif adalah suatu hubungan yang diatur oleh objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban. Hukum subjektif merupakan segi aktif dari hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri atas ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban dan pada pihak lawan. Hak dan merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>7</sup>

Daerah Bolaang Mongondow merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari daerah dan suku bangsa entik di kawasan Sulawesi Utara. Demikian terbentuknya menjadi fakta dan budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang tidak terpisahkan dari mata rantai sejarah masa lalu. Pada pemilihan umum tanggal 23 maret 1954, telah memasuki separuh abad lebih sebagai daerah otonom tingkat II, dengan suku aslinya Mongondow.

---

<sup>5</sup>Merphin Panjaitan, *Gerakan Warganegara Menuju Demokrasi* 2001 Jakarta:Restu Agung.hal 7

<sup>6</sup>Merphin Panjaitan, *Gerakan Warganegara Menuju Demokrasi* 2001 Jakarta:Restu Agung.hal 9

<sup>7</sup>H.Ishaq S.H. M Hum, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* 2016 Jakarta:Sinar Grafika. hal 16

Bolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten yang terletak di propinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas wilayah meliputi, sebelah utara laut Sulawesi, sebelah timur Minahasa selatan dan Minahasa Tenggara, sebelah selatan Teluk Tomini, sebelah barat Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Gorontalo. Dalam sejarahnya Bolaang Mongondow adalah sebuah daerah (*landschap*) yang berdiri sendiri dan memerintah sendiri dan masih merupakan daerah tertutup sampai dengan akhir abad ke 19. Hubungan dengan luar (asing) hanyalah hubungan dagang yang diadakan melalui kontrak dengan raja-raja yang memerintah pada saat itu<sup>8</sup>

Berbeda dengan Bolaang Mongondow sebelum adanya demokrasi Bolaang Mongondow masih menganut sistem kerajaan, dimana hanya bersifat turun temurun atau keturunan dari raja raja yang bisa memimpin suatu wilayah. Adapun kerajaan yang ada di Bolaang Mongondow meliputi 4 kerajaan asli Indonesia yang melaksanakan pemerintahannya sendiri atau masing-masing di sebut :

1. Kerajaan Bolaang Mongondow
2. Kerajaan Bolang Uki
3. Kerajaan Bintauna
4. Kerajaan Kaidipang Besar<sup>9</sup>

## 1.2 Ruang Lingkup Penelitian

---

<sup>8</sup> Irawan Paputungan, *Negeri Totabuan Dalam Bayang-bayang Bogani Lanskap Budaya, Perilaku Politik, dan Kekuasaan Orang Mongondow* 2011 Yogyakarta: Pustaka Felicha. hlm 33

<sup>9</sup> Z.A. Lantong, *Mengenal Bolaang Mongondow*, (U.D. Asli Totabuan 1996) hlm 27

Demi memfokuskan masalah yang ada dalam penelitian dan menghindari kekeliruan dalam interpretasi, maka perlu ditetapkan ruang lingkup dalam penelitian. Penelitian Sejarah terbagi dalam tiga ruang lingkup yaitu ruang lingkup *Scope Kajian*, *Temporal* dan *spasial*

### **1.2.1 *Scope Kajian***

*Scope Kajian* ini adalah fokus pada Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.

### **1.2.2 *Scope Spasial***

*Scope Spasial* Menunjukkan pada tempat objek yang akan menjadi objek penelitian yakni di Bolaang Mongodow lebih memfokuskan pada demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.

### **1.2.3 *Scope Temporal***

*Scope Temporal* (pembatasan waktu) di mana peneliti akan melakukan penelitian Demokrasi Di Bolaang Mongondow 1950.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Penulis memfokuskan pada pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis merumuskan masalah ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana akhir sistim Kerajaan di Bolaang Mongondow ?
- b. Bagaimana proses terbentuknya Demokrasi di Bolaang Mongondow tahun 1950.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Mengetahui akhir kerajaan di Bolaang Mongondow
- b. Mengetahui proses Terbentuknya demokrasi di Bolaang Mongondow tahun 1950

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoretis

Secara teoristik penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Bagaimana demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.

- b. Manfaat Praktis

secara praktis ,temuan penelitian ini dapat : 1) memberikan masukan dan pertimbangan bagi penentu kebijakan terutama yang berkaitan dengan Historis antar Daerah, 2) membuka wawasan masyarakat dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya arsip Daerah dan Nasional

## **1.6 Kerangka Teoretis dan Pendekatan**

Penelitian sejarah ini termasuk penelitian lokal karena di dalam penelitian ini di uraikan mengenai peristiwa yang terjadi di Bolaang Mongondow terutama terkait dengan demokrasi di Bolaang Mongondow 1950 yang menjadi fokus penelitian. Penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian, tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungan, dan konteks sosial.<sup>10</sup>

### **1.6.1 Kerangka Teoretis**

---

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo,*Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. 2017 Yogyakarta:Ombak.hal 2

Penulis menggunakan tradisi penulisan sejarah naratif sangat terikat pada paham bahwa setiap kejadian historis bersifat historis, artinya khusus dan hanya sekali itu terjadi, dan tidak akan terulang lagi. Metodologi sebagai ilmu tentang metode tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah kerangka teoritis dan konseptual oleh karena pendekatan sebagai pokok metodologi hanya dapat dioperasionalkan dengan bantuan seperangkat konsep dan teori.<sup>11</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teori politik, dan kekuasaan penulis akan berusaha mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana berlangsungnya demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.

### **1.6.2 Pendekatan**

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan sejarah sosial dimana kelompok-kelompok sosial seperti ulama, petani, mahasiswa, dan pemuda. Juga mempunyai aspirasi politik sesuai dengan kepentingannya. Sudah banyak ditulis orang mengenai golongan-golongan sosial di Indonesia.<sup>12</sup>

### **1.7 Tinjauan Pustaka**

Sumber-sumber yang di pakai dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber tulisan, yang dilakukan di perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo, Perpustakaan Daerah Bolaang Mongondow. Sumber-sumber itu terutama Tulisan tentang Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hal 3

<sup>12</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. 2003 Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yoga. hal 176

Buku Donald Qomaidiansyah Tungkagi. Oase Pustaka 2017 yang berjudul membaca kembali Bolaang Mongondow Renungan masa lalu, kini, dan nanti menjelaskan bahwa menganalisis sebuah peristiwa, baik telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, pada dasarnya hanya secarik potret betapapun kritisnya. Di dalamnya, terkandung upaya subjektif manusia yang mungkin saja akan terbukti sia-sia untuk menyelami masalah merentang-rentangkan baku kait dan silang sengakarutnya. Namun akhirnya, betapa pun luasnya, tetaplah terpagari oleh waktu.

Buku H.J.A. Damopolii. Yayasan Ibnu Sabil Kotamobagu 2003 yang berjudul Dodandian Kinotanoban dan kisahku dalam buku ini menjelaskan bahwa Dodandian dalam istilah Mongondow mengandung filosofi yang sangat dalam, kesetiaan dan tanggung jawab moral terhadap hasil musyawarah berasal dari akar kata Dandi, sumpah kesepakatan dengan sungguh-sungguh dipegang oleh setiap pribadi orang Mongondow.

Buku-buku yang membahas tentang demokrasi adalah bukunya Azyumardi Azra. 2002. yang berjudul *“Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”* Prenada Media. Jakarta. Di dalam buku menjelaskan bahwa sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>13</sup>

Buku karya dari Merphin Panjaitan. Yang berjudul *“Gerakan Warganegara menuju Demokrasi”* Restu Agung, Jakarta. 2001. Dimana di dalam buku ini menjelaskan bahwa Demokrasi merupakan pemerintahan oleh semua dan untuk kepentingan semua orang.

---

<sup>13</sup>Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. 2002 Jakarta. Prenada Media. hal 110

Demokrasi bukan sekedar pemerintahan oleh mayoritas, ras, dan suku tetapi semua orang bisa memerintah tanpa mengenal mayoritas, ras, suku.<sup>14</sup>

Buku dari H. Ishaq. "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*" Sinar Grafika, Jakarta. 2016. Dimana di dalam buku ini menjelaskan bahwa Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban dan pada pihak lawan.<sup>15</sup>

Buku yang membahas mengenai sejarah lokal yang ada di Bolaang Mongondow meliputi buku Z.A Lantong dengan judul mengenal Bolaang Mongondow. Tulisan budaya atau adat Bolaang Mongondow sudah banyak dikaji, namun karya ilmiah yang lebih fokus terhadap Demokrasi di Bolaang Mongondow masih jarang didapati, kecuali makalah pribadi ataupun tulisan. Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950, berdasarkan penelitian awal oleh peneliti termasuk belum ada. Namun demikian karya Ilmiah ataupun manuskrip pribadi tentang adat istiadat etnik Bolaang Mongondow telah ada.

Penulisan sejarah yang dilakukan oleh Dunnebie Mengenal Raja-raja Bolaang Mongondow, tulisan tersebut membahas mengenai hikayat Raja-raja yang pernah memimpin bekas Kerajaan Bolaang Mongondow. Sampai.<sup>16</sup>

Buku dari Reiner Emyot Ointoe dan M. Firasat Mokodompit membahas tentang etnik budaya dan perubahan yang ada di Bolaang Mongondow.

Selanjutnya buku-buku yang membahas mengenai teori-teori serta metode yang di gunakan untuk dapat mengungkap Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950 pada khususnya

---

<sup>14</sup> Merphin Panjaitan, *Gerakan Warganegara Menuju Demokrasi*. 2001 Jakarta: Restu Agung. hal 7 dan 9

<sup>15</sup> H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. 2016 Jakarta: Sinar Grafika. hal 17

<sup>16</sup> W. Dunnebie, *Mengenal Raja-Raja Bolaang Mongondow*. 1984 Surabaya: Intan Print. Hlm 1

buku-buku tersebut meliputi: Buku A. Daliman yang berjudul *Metode Penelitian Sejarah* yang membahas mengenai metode-metode dalam melakukan penelitian sejarah terutama dalam pengumpulan sumber yang menyangkut dengan Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950. Buku Sartono Kartodirdjo yang berjudul *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. buku ini membahas tentang konsep dan Perspektif dalam sejarah. dalam buku ini di dapatkan bahwa konsep dan perspektif dalam sejarah sangat erat, sehingga keduanya tidak dapat di pisahkan. Buku Helius Sjamsudin yang berjudul *Metodologi Sejarah* di dalam bukunya membahas tentang metode-metode dalam melakukan penelitian sejarah terutama mengenai pengumpulan sumber-sumber demokrasi di Bolaang Mongondow. Buku Kuntowijoyo yang berjudul *Metodologi Sejarah* dalam buku ini membahas tentang Sejarah dan Ilmu Politik .

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini tentu merupakan metode penelitian sejarah. Langkah-langka yang digunakan sebagai berikut:

### **1.8.1 Heuristik**

Tahapan pertama yaitu mencari, menemukan, mengumpulkan sumber sejarah yang masih berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam proposal ini, yakni Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Z.A. Lantong, *Mengenal Bolaang Mongondow*, (U.D. Asli Totabuan 1996) hlm 87

### 1.8.2 Kritik Sumber

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan dari sumber itu. Kritik sumber dapat dikelompokkan eksternal dan intern

#### 1. Eksternal

ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak.

#### 2. Interpretasi

Berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*facts*) atau bukti-bukti sejarah (*evidences*).<sup>18</sup> Setelah semua melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan yang terkait dengan Demokrasi di Bolaang Mongondow 1950.

### 1.8.3 Histiografi

Adalah sesudah menyelesaikan langkah-langkah pertama dan kedua berupa Heuristik dan kritik sumber<sup>19</sup> penulis mengkaji topik tersebut dengan menggunakan sumber teknik dan pendekatan Teotiris terkait dengan Demokrasi di Bolaang Mongondow.

## 1.9 Sistematika Penulisan

---

<sup>18</sup>A. Daliman, M.Pd. *Metode Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta.2012. Hlm 81

<sup>19</sup>Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta:Ombak, 2007) Hlm99

Hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan dalam metode penelitian sejarah dalam tulisan ini, Demokrasi Di Bolaang Mongondow 1950 akan dibagi dalam

BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang, ruang Lingkup Penelitian, rumusan Masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka teoritis dan pendekatan, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II, membahas tentang gambaran umum lokasi yang menjelaskan tentang sejarah Kotamobagu, moto daerah Bolaang Mongondow, geografi dan topografi Bolaang Mongondow, asal-usul Bolaang Mongondow, masuknya agama Islam di Bolaang Mongondow, dimensi pemerintahan para Punu dan Raja. Bab III, demokrasi di Bolaang Mongondow 1950, akhir sistem Kerajaan, Peran Partai syarikat Islam Indonesia. Bab IV, menguraikan Hasil Penelitian, terbentuknya demokrasi di Bolaang Mongondow 1950, Dimensi Pemerintahan Bupati. Bab V. penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini.